



DIKBUD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



BERANDA

PROFIL ▼

BERITA ▼

DAPODIK ▼

BIDANG ▼

PPID

BAHAN AJAR

SPAB

KONTAK KAMI

SELAMAT DATANG

DI DINAS DIKBUD PROVINSI NTB

Inovasi SIDIK JARI berhasil menjadi salah satu *Top eNTeBeNOVIK 2019*
Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemprov NTB



SIDIK JARI
Sistem Informasi Pendidikan & Jejaring

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Mataram, Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	4
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
1.4. Struktur Organisasi	8
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Tujuan dan Sasaran	17
2.3. Indikator Utama	19
2.4. Penilaian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2023	24
3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023	25
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	26
3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.5. Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan	34
3.6. Realisasi Anggaran	35
3.7 Realisasi Anggaran Dinas Dikbud tahun 2023 Perbidang dan UPTD	36
3.8 Realisasi Anggaran Dinas Dikbud Tahun 2018 s/d tahun 2023	47
3.9 Efisiensi Anggaran Dinas Dikbud Tahun 2023	48
BAB IV	
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Langkah ke depan Kinerja Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3 Target Dan Realisasi Capaian Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023	25
Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	26
Tabel 6. Permasalahan Dalam Pencapaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2023	28
Tabel 7. Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja	34
Tabel 8. Distribusi Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2023	35
Tabel 9. Realisasi Anggaran Dikbud NTB per bidang dan per subbagian	36
Tabel 10. Realisasi Anggaran Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2018 s.d 2023	47
Tabel 11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2021	9
Gambar 2. Struktur Organisasi Cabang Dinas PerGub Nomor 91 Tahun 2022	9
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam *dokumen perjanjian kinerja* dan *dokumen perencanaan*. Selain itu, Dokumen LKjIP terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sebuah akuntabilitas, dalam sebuah organisasi diperlukan pemberdayaan semua komponen yang bekerja dalam sebuah system. Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja, diperlukan sebuah laporan kinerja. Dalam hal ini, selain sebagai kewajiban, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bermaksud untuk menyajikan sebuah laporan kinerja yang menggambarkan kinerja utuh, yang telah tersusun secara systemic dalam organisasi, terukur, dan tergambar secara nyata tingkat tanggungjawab setiap pemangku kegiatan di lingkungan Dikbud Provinsi NTB. Dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai gambaran tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut ini dipaparkan tentang organisasi Dikbud NTB, potensi dan kekuatan atau aspek – aspek strategis dalam organisasi dalam menghadapi atau menangani berbagai permasalahan pendidikan di NTB. Personel yang bekerja dalam struktur organisasi berikut dengan tugas dan fungsi mereka dalam mengelola pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

1.1. Gambaran Umum

Dalam mengemban tujuan dan amanah konstitusi yaitu untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, layanan pendidikan dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan skala nasional. Sebagai lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB membantu Gubernur Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam Visi dan Misi Gubernur Provinsi NTB yaitu ingin mewujudkan “*NTB Gemilang*”. Khusus untuk pendidikan tertuang dalam misi ke 3 (tiga) yaitu “*NTB Sehat dan Cerdas*” selanjutnya, Dikbud NTB menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dengan rumusan tujuan *Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan, Strategi meliputi Peningkatan Pemerataan Pendidikan; Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan; dan Peningkatan kualitas data.*

Penerapan visi dan misi tersebut mencakup seluruh penduduk NTB yang mencapai 5,560,287 jiwa pada tahun 2023 dan khusus penduduk kelompok usia sekolah menengah (16 - 18 tahun) mencapai 216.848. Jumlah Sekolah Menengah mencapai 150 SMA Negeri, 192 SMA Swasta, 99 SMK Negeri, 231 SMK Swasta, 18 SLB Negeri, dan 32 SLB Swasta sehingga total jumlah Sekolah mencapai 723 Sekolah. Rasio Murid dengan Guru Tingkat SLB adalah 1 : 6, Rasio murid dengan Guru pada tingkat SMA adalah 1 : 12 dan Rasio Murid dengan guru tingkat SMK adalah 1 : 10.

Itulah gambaran singkat sasaran pembangunan bidang pendidikan di NTB belum termasuk Anak Berkebutuhan Khusus yang mencapai 8,524 jiwa sampai dengan tahun 2023. Sasaran usia sekolah menengah yang terdaftar di Madrasah Aliah dan Pendidikan Kesetaraan lainnya yang tidak mungkin diabaikan, kesejahteraan guru tidak tetap, ruang kelas dan fasilitas belajar Madrasah Aliah dan program Kesetaraan lainnya.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB telah melaksanakan sejumlah program perluasan akses Pendidikan Menengah Atas sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Program – program tersebut didukung oleh anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp. 1,205,298,953,454 pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar Rp. 1,240,254,550,830 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,257,305,198,489. Sedangkan realisasi keuangan dari tahun 2018 sebesar 95.27, tahun 2019 sebesar 96.04, dan tahun 2020 sebesar 98.32, realisasi fisik tahun 2018 mencapai 98.95 tahun 2019 mencapai 99.37, dan realisasi fisik tahun 2020 mencapai 99.84. Tahun Anggaran 2021, Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sebesar Rp. 2,008,563,761,955,- Realisasi Keuangan mencapai Rp. 1,921,991,195,307,- atau sebesar 98.00 % sedangkan Realisasi Fisik mencapai 98.44 %. Tahun 2022 Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 1.615.948.287.284,- sedangkan realisasi Keuangan mencapai Rp. 1.443.642.916.580.- dan realisasi fisiknya 89.34 %. Tahun 2023 Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 1.724.616.415.106,- Realisasi keuangan tahun 2023 mencapai Rp. 1.598.199.923.537,-dan realisasinya 92,67 %.

Indikator pengukuran kinerja bukan hanya realisasi anggaran seperti di atas, Laporan Akuntabilitas ini perlu disusun dengan berpedoman kepada beberapa regulasi. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023;
14. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Tahun 2019 - 2023;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2023 Tanggal, 2 Januari 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA/B.2/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2023) 2023 Tanggal 11 Desember 2023.

Selain peraturan dan perundang – undangan di atas, secara menyeluruh LKJip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 akan mencakup semua Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek - aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi potensi atau kekuatan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang kekuatan – kekuatan di dalam organisasi. Sedangkan disatu sisi terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang tentunya nanti mempengaruhi pencapaian tujuan atau pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan walaupun dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pembangunan pendidikan, perlu dikembangkan

strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan pendidikan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan. Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

- **Perspektif Masyarakat / Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi.
- **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
- **Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan jenis investasi kepada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
- **Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Pendidikan NTB 5 tahun kedepan, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan misi dan tujuan pembangunan 2019 - 2023 sebagaimana tabel berikut;

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terdiri dari beberapa bidang Pembinaan adalah sbb :

- A. Urusan Pendidikan :

- ❖ Data peserta didik lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi belum semuanya terdata terutama sekolah swasta
- ❖ Nilai literasi dan numerasi SMA masih dibawah rata-rata nasional
- ❖ Kondisi sarpras SMA masih ada yang belum memadai (Melakukan rehabilitasi baik ringan/sedang /maupun berat
- ❖ Kondisi sebaran ruang kelas tidak merata
- ❖ Ketersediaan ruang lab dan perpustakaan masih terbatas terutama sekolah swasta
- ❖ Pada sekolah tertentu ketersediaan ruang kelas melebihi kebutuhan namun pada sekolah lain masih tercatat kurang
- ❖ Terbatasnya sarana penunjang seperti, Lab, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang OSIS, ruang BK dll
- ❖ Nilai literasi dan numerasi SMK masih dibawah rata-rata nasional
- ❖ Terbatasnya kompetensi lulusan SMK ditandai dengan terbatasnya kepemilikan sertifikat kompetensi
- ❖ Keterserapan lulusan SMK belum maksimal
- ❖ Ketersediaan Guru produktif sangat terbatas
- ❖ Nilai literasi dan numerasi SLB masih dibawah rata-rata nasional
- ❖ Terbatasnya guru lulusan PLB
- ❖ Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus pada sekolah penyelenggara Inklusif sangat terbatas
- ❖ Kurangnya pengawas mata pelajaran SMA/SMK/SLB
- ❖ Kurangnya guru produktif untuk KK tertentu
- ❖ Kurangnya GPK (Guru Pendamping Khusus) pada sekolah penyelenggara Inklusif sangat terbatas
- ❖ Kurangnya jumlah tenaga administrasi yang ASN yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan
- ❖ Kurangnya Jumlah tenaga laboran, perpustakaan, dan teknis Kurangnya jumlah guru penggerak di SMK/SMA/SLB
- ❖ Banyaknya guru yang belum bisa sertifikasi karena tidak bisa PPG
- ❖ Adanya guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan mengajukan naik pangkat melalui jalur umum
- ❖ Kurangnya Pemahaman guru terhadap Literasi dan Numerasi
- ❖ Kurangnya pemahaman guru tentang pembuatan soal tentang literasi dan numerasi
- ❖ Kurangnya pengawas guru produktif
- ❖ Kurangnya Pemahaman terhadap Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

B. URUSAN KEBUDAYAAN

- ❖ Kurangnya pendokumentasian (tertulis Audio Visual) karya budaya dari OPK yang ada di NTB

- ❖ Belum ada Data Base Kebudayaan Prov. NTB yang terdiri dari : Tenaga kebudayaan, Aktivitas Budaya di masyarakat, Lembaga-lembaga Kebudayaan dimasyarakat
- ❖ Kurangnya pembinaan ke masyarakat tentang 5P OPK : Pengembangan, Pelestarian, Pemanfaatan, Perlindungan, Pembinaan
- ❖ Belum adanya standarisasi (pakem) dari OPK sehingga OPK tidak berkembang dan jika berkembangpun tidak sesuai dengan kearifan lokal
- ❖ Bidang Kebudayaan selalu digarda terdepan tetapi ada proses persiapan dan penganggaran selalu ditempatkan dibelakang kepentingan-kepentingan Pendidikan
- ❖ Kurangnya Informasi kesenian, Dokumentasi tertulis dan audio visual sangat langka sehingga masyarakat tidak memiliki acuan untuk mengembangkan kesenian tradisional dilingkungannya, hal ini menyebabkan jumlah kelompok-kelompok kesenian dimasyarakat makin berkurang.
- ❖ Kurang maksimalnya fungsi Pendidikan kesenian disekolah, pelajaran kesenian masih menekankan pada aspek Kognitif Kurang memperhatikan aspek efektif (apresiasi)
- ❖ Kurangnya tenaga Guru kesenian yang berkelayakan dan berkopetensi
- ❖ Kurangnya pembinaan Kesenian
- ❖ Kurangnya Jabatan Fungsional ditingkat Kecamatan
- ❖ Beragamnya Nomenclatur/Sistem kelembagaan ditingkat kabupaten/Kota yang menangani Kebudayaan
- ❖ Rendahnya apresiasi masyarakat
- ❖ Kurangnya penghargaan pemerintah terhadap pelaku seni Budaya

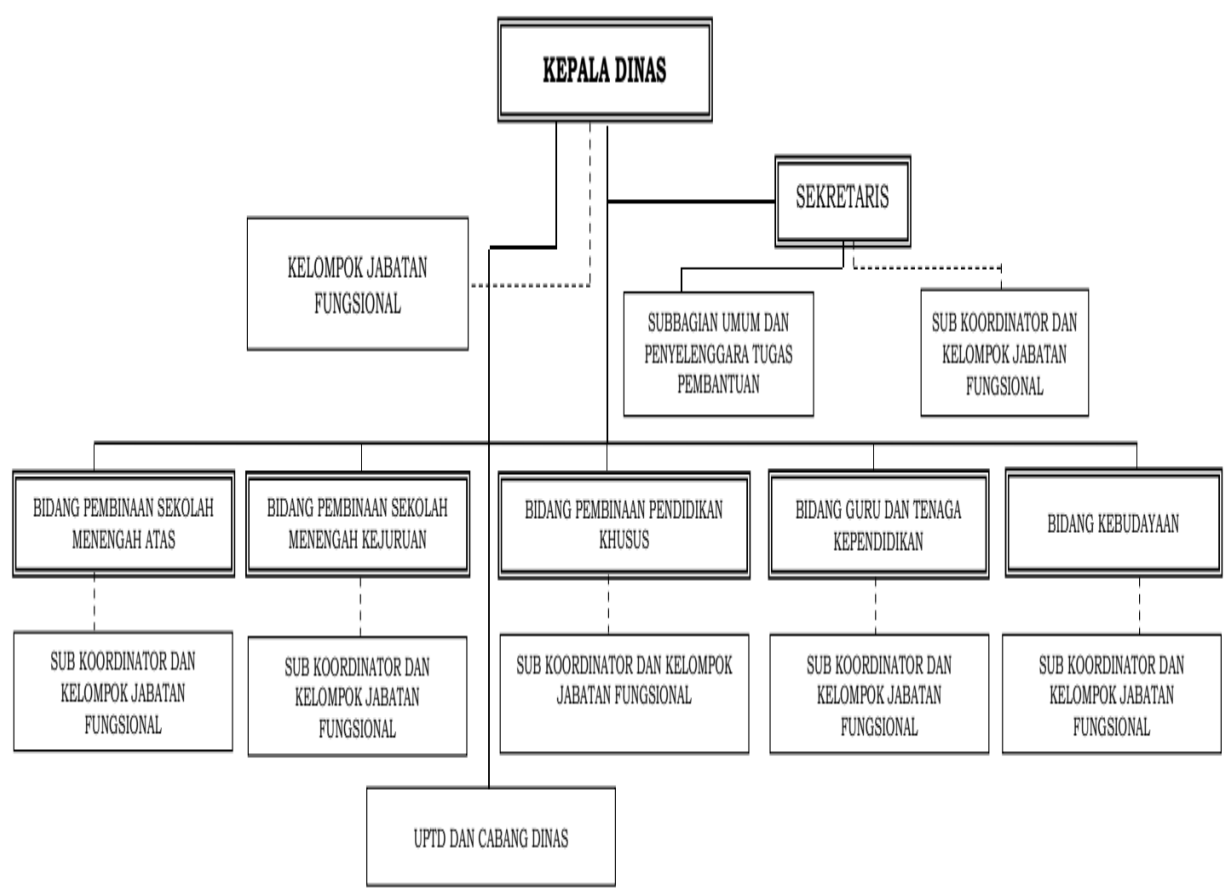
1.4. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Sedangkan untuk UPTD yang berada pada dinas Dikbud Provinsi NTB ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Cabang Dinas pada Dinas Dikbud ditetapkan Peraturan Gubernur 91 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus struktur organisasinya ditetapkan dalam Pergub 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

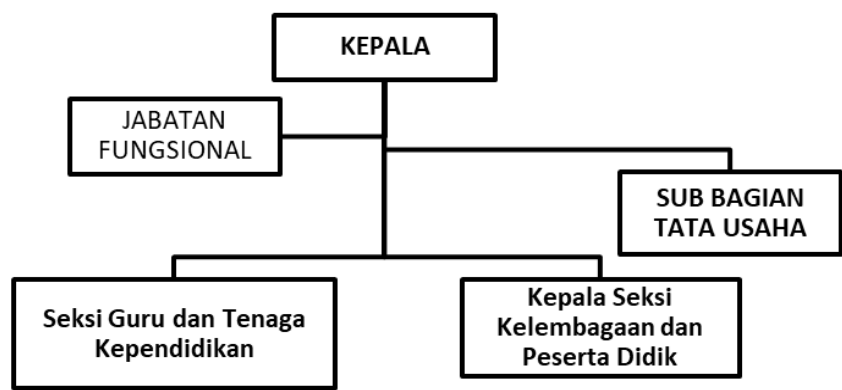
- ❖ Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



- ❖ Struktur Organisasi UPTD Lingkup Dinas Dikbud Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



- ❖ Gambar 2. Struktur Organisasi Cabang Dinas Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretariat, terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Penyelenggara Tugas Pembantuan; Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pendidikan Khusus, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang Kebudayaan;

Sedangkan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s; terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan; (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pengembangan Media Pembelajaran; (3) Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Pendidikan; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelestarian Seni Budaya; (3) Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pengkajian dan Perawatan; (3) Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan; terdiri atas (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Khusus (PK), Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, serta Kesekretariatan.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan strategis dibidang pendidikan dan kebudayaan; Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang pendidikan dan kebudayaan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan; Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Sekretaris, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan meliputi program, keuangan serta umum.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang kesekretariatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesekretariatan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.3. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan SMA

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan meliputi kurikulum, pengembangan bahasa dan sastra SMA, peserta didik SMA, kelembagaan dan sarana prasarana SMA.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMA juga menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan SMA;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan SMA;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan SMA; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan SMK

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan meliputi kurikulum, pengembangan bahasa dan sastra SMK, peserta didik SMK, serta kelembagaan dan sarana prasarana SMK.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMK juga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan SMK;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan SMK;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan SMK; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.5. Tugas dan Fungsi Bidang Pendidikan Khusus

Bidang Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan meliputi kurikulum pendidikan khusus, peserta didik pendidikan khusus, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Khusus juga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pendidikan Khusus;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Khusus;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan Khusus; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.6. Tugas dan Fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan meliputi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, Guru dan Tenaga Kependidikan SMK, serta Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan juga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.7. Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan meliputi, Cagar Budaya Museum, Sejarah dan Tradisi serta Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan juga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang kebudayaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang kebudayaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.8. Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 8 (delapan) cabang dinas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, yaitu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima.

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Daerah Provinsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang SMA, SMK, PK di kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis pendidikan SMA, SMK, PK, dan kebudayaan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, monitoring dan pembinaan SMA, SMK dan PKPLK serta Kebudayaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pembinaan SMA, SMK, PK, dan Kebudayaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1.5.9. Tugas dan Fungsi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan

UPTD Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan meliputi, kesekretariatan, pengembangan media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data pendidikan.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD BTIDP juga menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Balai Teknologi Informasi Dan Data Pendidikan;

- Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Teknologi Informasi Dan Data Pendidikan;
- Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Teknologi Informasi Dan Data Pendidikan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Balai Teknologi Informasi Dan Data Pendidikan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.10. Tugas dan Fungsi UPTD Taman Budaya

UPTD Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan meliputi, kesekretariatan, pelestarian seni budaya, dan penyelenggaraan seni budaya.

- Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya juga menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan bahan/materi dan penyusunan kebijakan strategis Taman Budaya;
- Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Taman Budaya;
- Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Taman Budaya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Taman Budaya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.11. Tugas dan Fungsi UPTD Museum Negeri

UPTD Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan meliputi, kesekretariatan, pengkajian dan perawatan, dan penyajian dan layanan edukasi.

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Museum Negeri Nusa Tenggara Barat juga menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan/materi dan penyusunan kebijakan strategis Museum;
- Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Museum;
- Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Museum;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Museum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang periode 2019-2023. Amanah yang diberikan melalui misi NTB Sehat & Cerdas serta NTB Aman & Berkah dijadikan pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan terwujudnya jangkauan pembangunan kebudayaan yang berkualitas. Sedangkan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2019-2023 adalah meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meningkatnya capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan manajemen, serta meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan tersebut serta target indikator tujuan/ sasaran tahunan yang akan dicapai, maka disusun keterkaitannya seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
1	Terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	APK SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	98,13	98,63	99,15	99,95	100	100
			APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	90,5	92,42	93,4	93,40	98.50	98.70
			APS SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	94.57	95.79	96,68	97,57	98,85	98.88
			APK SLB	Persen	68,44	69	69,4	70	86.85	87.9
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Persen	69,21	71,30	73,44	75,58	76,25	67
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan	Persen	24	28	32	36	54.76	56

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
2.	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan		Khusus Minimal B							
			Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)	Persen	-	-	60	65	67	67,5
			Persentase Lulusan SMK yang terserap	Persen	-	-	10	35	37	55
3	Terwujudnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	-	-	-	45,11	51,56	
		Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Pengembangan OPK	Persen	-	-	-	50	83.33	83.33

DARI SKEMA TUJUAN DAN SASARAN YANG ADA DIATAS DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MEMPUNYAI 3 TUJUAN :

1. TERWUJUDNYA JANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

DENGAN SASARAN YANG INGIN DI CAPAI ADALAH

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DENGAN INDIKATOR MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- A. APK SMA/MA/SMK/PAKET C
- B. APM SMA/MA/SMK/PAKET C
- C. APS SMA/MA/SMK/PAKET C
- D. APK SLB

2. MENINGKATNYA CAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN SASARAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN DENGAN INDIKATORNYA SEBAGAI BERIKUT :

- A. PERSENTASE NILAI AKREDITASI PENDIDIKAN MENENGAH MINIMAL B
- B. PERSENTASE NILAI AKREDITASI PENDIDIKAN KHUSUS MINIMAL B
- C. PERSENTASE LULUSAN SMA YANG MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI
- D. PERSENTASE LULUSAN SMK YANG TERSERAP

3. TERWUJUDNYA PEMAJUAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

DENGAN SASARAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK)

SEBAGAI INDIKATORNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- A. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
- B. PROSENTASE PENGEMBANGAN OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK)

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA MERUPAKAN UKURAN KEBERHASILAN DARI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB. PENETAPAN INDIKATOR DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENDUKUNG TUJUAN STRATEGIS. INDIKATOR INI DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGIS, SEDANGKAN KEBERHASILAN KEGIATAN DI UKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KELUARAN.

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
		APM SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{PD Usia 16-18 thn Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
		APS SMA/MA/SMK/Paket C	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik Usia 16-18 tahun yg masih sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
		APK SLB	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Peserta didik SLB}}{\text{Penduduk berkebutuhan khusus usia 7 -18 tahun}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber : Dikbud Prov. NTB
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{SMA + SMK terakreditasi A + B}}{\text{Seluruh SMA + SMK yang sudah terakreditasi}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Badan Akreditasi Nasional BAN-SM
		Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{SLB terakreditasi A + B}}{\text{Seluruh SLB yang sudah terakreditasi}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Badan Akreditasi Nasional BAN-SM
		Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Lulusan SMA kejenjang Perguruan Tinggi thn n}}{\text{Lulusan SMA di tahun n}} \times 100$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB
		Persentase Lulusan SMK yang terserap	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{Lulusan SMK yg terserap di tahun n}}{\text{Lulusan SMK di tahun n}} \times 100$

			Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB
3	Meningkatkan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase OPK yang dikembangkan	Formulasi Penghitungan $\frac{\sum \text{OPK yang dilestarikan}}{\text{OKP yang ada}} \times 100$ Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Dikbud Prov. NTB

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitroing, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *Punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram Tlp. Fax (0370) 632593

[Http://dikbud.ntbprov.go.id](http://dikbud.ntbprov.go.id) email : dikbud@ntbprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,, 2023

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target 2023
1	2	3		4
1	Meningkatnya Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	1	APK SMA, MA, SMK, Paket C	100 %
		2	APM SMA, MA, SMK, Paket C	98.10 %
		3	APS SMA, MA, SMK, Paket C	98.55 %
		4	APK SLB	86.85 %
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	5	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	76.25 %
		6	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	54.76 %
		7	Persentase Lulusan SMA yang Melanjutkan	67 %
		8	Persentase Lulusan SMK yang terserap	37 %
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	9	Persentase Pengembangan OPK	83.33 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp.582.179.459.738,-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1 dan 2 PK Indikator Kinerja PK no. 1 s.d 8, IKU Provinsi No.12 dan 13, dan IKD No. 14, 15 dan 16
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 51.146.014.300.-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 2 PK Indikator kinerja PK No.8, 9 dan 11, IKU Provinsi No. 12 dan 13 dan IKD No. 14, 16 dan 16
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 1.405.481.100,-	Sumber Dana : APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja no.9 RPJMD Bab VIII IKD No. 64
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp. 1.152.481.100.-	Sumber Dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja No.8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp. 416.251.100.-	Sumber Dana : APBD

			mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja No 8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64
			Sumber Dana : APBD
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 122.587.300.-	mendukung Sasaran Strategis No. 3 PK Indikator Kinerja No 8 RPJMD Bab VIII IKD No. 64

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Gambar 3 Penilaian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tahun 2023 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB dengan Gubernur NTB, yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan yang hendak dilaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

3.1 Capaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2023

Sebagaimana struktur Permendagri No. 90 Tahun 2019, berikut ini dipaparkan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2023

Tabel 3. Target Dan Realisasi Capaian Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	115.78	115,78 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	98.10	98.50	100.41%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	98.55	98.85	100.30 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	86.85	87.74	101.2 %
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	%	76.25	66.10	86.69%
		Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	%	54.76	55.56	101.46
		Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan	%	67	67,3	100,30 %
		Persentase lulusan SMK yang terserap	%	37	54	145.95%

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1	2	3	4	5	
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Pengembangan OPK	%	83.33	83,33	100%

3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
			TARGE T	REALISASI	%	TARG ET	REALISASI	%	TARGE T	REALISASI	%	TARG ET	REALIS ASI	%
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pake t C	98.63	102.21	103.63	99.15	106.41	107.32	99.95	107.34	107.39	100	115.78	115.78
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pake t C	92.42	92.57	100.16	93.40	96.65	103.48	94.38	97.28	103.07	98.10	98.50	100.41
		3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Pake t C	95.79	95.79	100.00	96.68	98.08	101.45	97.57	98.18	100.63	98.55	98.85	100.30
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.00	81.71	118.42	69.40	84.19	121.31	70	89.33	127.67	86.85	87.74	101.2
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	5 Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Min. B				73.44	69.40	94.5	75.58	67.58	89,41	76.25	66.1	86.69
		6 Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				32	42	131.25	36	42	116.66	54.76	55.56	101.46
		7 Persentase lulusan SMA yang melanjutkan				60	24	40	65	66.02	101.56	67	67.3	100.44
		8 Persentase Lulusan SMK yang terserap				10	35	350	35	35.31	100.88	37	54	145.95
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	7 Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan							50	83,33	138,88	83.33	83.33	100

3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Solusi

Penilaian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tolak ukur keberhasilan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi semua masyarakat pada umur sekolah yang berada pada dunia kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang menangani SLB/SMA/SMK, Kemenag yang menangani MA/ sederajat, serta Dinas Pendidikan di Kabupaten yang menangani Pendidikan dasar dan Paket C.

Pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA/Paket C di tahun 2023 telah melampaui target dari yang direncanakan yaitu dari 100 % menjadi 115,78 % yang dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 banyak anak usia pendidikan menengah yang bersekolah dari pada anak yang tidak bersekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan terlampauinya target pada tahun 2023 ini diantaranya adalah : dilihat dari data bahwa ada anak yang masih berada di bawah ketentuan masuk sekolah sudah ada di pendidikan salah satunya adalah anak yang berumur 5 s/d 6 tahun sudah masuk SD sehingga pada saat masuk SMA/ sederajat umurnya dibawah 16 tahun. Faktor yang kedua adalah adanya anak yang tinggal kelas, faktor yang ketiga adalah adanya penduduk dari provinsi lain yang bersekolah di daerah Provinsi NTB dikarenakan salah satu adalah kepindahan orang tua.

Pada capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 melebihi dari target yaitu 98,10 % menjadi 98.50 % dapat diartikan bahwa usia anak usia 16 s.d 18 meningkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari APM adalah :

1. Aksesibilitas mudah karena sudah keluar dari pandemi covid 19
2. Kesadaran masyarakat yang sudah tinggi akan kebutuhan pendidikan
3. Keadaan ekonomi yang mulai pulih dengan slogan pulih lebih cepat bangkit lebih kuat

Pada capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 meningkat dari 98,55 % menjadi 98,85 % dapat diartikan bahwa ada anak-anak usia sekolah yang melebihi usia sekolah yaitu melebihi usia 18 tahun dikarenakan ada anak yang tinggal kelas dan ada anak-anak yang telat masuk sekolah pada awalnya sehingga melebihi usia yang seharusnya selesai pada taraf pendidikan tersebut.

Pada Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dari target 86,85 % menjadi 87,74 % dapat diartikan bahwa peserta didik pada usia sekolah pendidikan khusus telah melampaui jumlah penduduk yang berkebutuhan khusus pada usia tersebut.

Pada capaian Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah dikarenakan perubahan sistem penilaian akreditasi dari Penilaian perkompetensi keahlian menjadi persatuan pendidikan dan berubahnya beberapa kompetensi keahlian pada beberapa SMK atau dikenal dengan Refokusing core bisnis dan refokusing kompetensi keahlian, sehingga dikarenakan berubah jurusan sehingga akreditasinya mengulang kembali.

Pada capaian prosentase lulusan SMA yang melanjutkan telah mencapai target dari 67 % menjadi 67,3 %. Pada penelusuran lulusan SMA lewat link Tracer study yang dilakukan pertama kali pada tahun 2023 ini merupakan penelusuran by name dan by address dimana tiap sekolah mengisikan sesuai dengan

nama siswanya dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi mana mereka melanjutkan studynya dan bekerja di mana . Masih banyak dari sekolah-sekolah yang belum mengisi penelusuran alumni tersebut kemungkinan karena penelusuran ini dilakukan pada bulan Desember sehingga sekolah-sekolah sudah kehilangan kontak dengan alumninya, sehingga diperlukannya pendataan yang baik sebelum lulusan mengambil Ijazahnya.

Pada capaian penelusuran Lulusan SMK yang terserap terdapat tiga (3) kriteria yakni:

1. Bekerja di dunia kerja
2. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi
3. Berwirausaha

Lewat link tracer study yang telah dilakukan terdapat kenaikan dari target yang diharapkan dari 37 % menjadi 54 % . Pada penelusuran ini juga by name by address bagi semua sekolah SMK se NTB dimana masih terdapatnya sekolah-sekolah yang masih belum mengisi link tersebut terutama sekolah-sekolah swasta, sehingga perlunya koordinasi yang baik dengan pihak pengelola sekolah-sekolah swasta serta perlunya pendataan yang baik sebelum lulusan mengambil izasahnya.

Pada Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adanya gerakan Sabtu budaya di sekolah se NTB, telah diterbitkannya Perda Nomor 16 tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada target 83,33 % menjadi 83,33 % dari 12 OPK telah dikembangkan 10 OPK .

Koordinasi dan kerjasama antara semua komponen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat intensive dilakukan. Penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, volume dan frekuensi kegiatan yang sangat tinggi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam bertugas sehingga apabila terdapat kendala segera terindentikasi dan teratasi. Selain koordinasi internal, koordinasi antara atau dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya tetap dilakukan dengan intensive. Terutama dalam kegiatan perencanaan, pencairan anggaran, pelaporan, penyediaan atau penggunaan barang dan jasa. Peran teknologi komunikasi, peran aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan dan Anggaran dan model – model interaksi online jarak jauh sangat membantu pelaksanaan tugas.

Faktor pendukung lainnya, disatu sisi keterbatasan anggaran daerah akan tetapi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terdapat sumber anggaran lain yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Seperti 1) Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan, rehab, dan sarana prasarana sekolah, 2) DAK Non Fisik untuk Museum, Taman Budaya, dan BOS Sekolah. Faktor penghambat secara singkat dapat digambarkan bahwa kegiatan tidak dapat dieksekusi yaitu karena revisi anggaran berkali – kali sehingga menyebabkan durasi waktu yang tersedia sangat pendek, karena kesalahan pada Pendataan lewat Operator Dapodikmen, operator Emis serta Operator Dapodikdasmen Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kekurangan Sumber Daya Yang Kompeten, ketersediaan anggaran Daerah dan lainnya ..

Sedangkan pada tahun 2023, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana matrik berikut ini.

TABEL 6. PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIN KINERJA DIKBUD NTB TAHUN 2023

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	APS SMA/MA/SMK/ Paket C	Kurangnya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Masih belum baiknya koordinasi dengan Kemenag dan Kabupaten
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Keterbatasan Anggaran, Sebaran Penduduk, Jumlah Ruang Kelas yang masih Belum tergambar kondisi fisik Ruang Kelas yang ada di DAPODIK
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Perlunya analisis kebutuhan guru yang tepat sampai ke jurusannya/bidang study
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Perlunya analisis kebutuhan guru sampai ke bidang study
Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	Masih kurangnya perhatian terhadap akreditasi sekolah
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	Belum semua Sekolah Negeri dan sekolah swasta mengirimkan data siswa melanjutkan melalui Link yang telah disebar ke sekolah se-NTB, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penekanan dari bidang
	Penurunan Angka DO SMA	Perlunya updating di Dapodik
	Persentase SMA yang direvitalisasi	Target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2023 dikonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Persentase Data Sarpras SMA yang tersedia	Masih perlunya updating data dapodik
	Persentase peserta didik yang menerima Layanan SPM bidang Pendidikan	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelepasan dan telah mengusulkan pengajuan

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
		dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Persentase Pelaporan penggunaan dana BOS	Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMA	Perlunya sosialisasi pengelolaan BOS secara masif
	Persentase pembinaan prestasi siswa	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Data Peserta Didik SMA yang tersedia	Diperlukannya diklat untuk operator Dapodik
	Persentase Akreditasi SMA minimal B	Berdasarkan Lap. Hasil akreditasi BAN SM
	Persentase Usulan pengajuan Izin Operasional yang disetujui	Target tidak mencapai 100% karena adanya regulasi baru terkait perizinan sekolah dimana dinas tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin sekolah dan penerbitan izin harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase SMA yang menerapkan SKS	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
	Persentase Dokumen Kurikulum yang disyahkan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK	Persentase akreditasi SMK Minimal B	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Penurunan DO SMK	
	Persentase angka terserap Ke Dudi	Belum semua sekolah mengisi Tracer study yang telah dikirimkan lewat Link karena masih kurangnya sosialisasi dan penekanan dari bidang

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Persentase SMK yang direvitalisasi sarprasnya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah peserta didik SMK yang menerima SPM Pendidikan (Alat tulis)	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan mengusulkan dana ke BPKAD tapi dana yang tersedia 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Jumlah Siswa Penerima BOS	
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD	Usulan telah disampaikan kepada Tim Penilai yang terdiri dari Sekda, Karo Ekonomi, Karo Hukum, inspektorat, Bappeda dan BPKAD namun hingga saat ini hasil penilaian belum keluar
	Persentase Data Sarpras yang tersedia	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data penerima terlambat diterima, dan anggaran yang tersedia hanya setengah sehingga tidak dieksekusi
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase APK SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data terlambat diterima, anggaran yang tersedia hanya setengahnya
	Jumlah siswa penerima BOS	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Kurikulum disyahkan	Anggaran difocusing
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Pendidik SMK minimal DIV/SI dan bersertifikat pendidik	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio guru terhadap peserta didik SMA	1 : 13
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	1: 11
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SLB	1: 5
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMA, SMK, dan SLB	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
	Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PTK dan Tenaga Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Swasta yang terpantau perizinannya	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Naskah Buku Bacaan, Modul dan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Daerah yang tersusun	Akibat Refokusing anggaran berdampak pada perolehan Juara yang seharusnya 6 orang menjadi 4 orang sehingga penghargaan pemerintah pada masyarakat tidak memenuhi target.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan di Sekolah Negeri	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	Perlunya pembinaan dan sosialisasi dari bidang teknis

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada tahun 2023 sangat sering dilakukan, pelaksanaan efisiensi tetap mengacu kepada ketentuan atau anjuran OPD terkait dan lembar kerja. Anggaran kegiatan yang paling sering terkena rasionalisasi atau pemangkasan seperti kegiatan – kegiatan Pelatihan yang harus mengumpulkan banyak orang, perjalanan Dinas yang tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun demikian, koordinasi harus berjalan dan merubah pola; mengurangi volume, bahkan menghapus kegiatan, atau diganti dan dilaksanakan melalui media teknologi informasi. Sebagai dampak efisiensi tersebut realisasi anggaran tidak mungkin mencapai 100%. Adapun gambaran Efisiensi anggaran dapat dibaca pada tabel 11.

3.5. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 7. Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK UTAMA
1	Meningkatnya Aksesibilitas Peningkatan Layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik/emis/dapodikdasmen	Pemberdayaan Managemen Data	Koordinasi lintas sektoral antara Dikbud, Kemenag dan Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya mutu Pendidikan	5	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Min. B	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik	Pemberdayaan Managemen Data Dapodik	Sosialisasi dan Pelatihan Operator Dapodik
		6	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Pendataan lewat Dapodikmen	Updating Data Dapodik	Pemberdayaan Managemen Data Dapodik	Sosialisasi dan Pelatihan Operator Dapodik

		7	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan	Tracer Study SMA	Pembuatan Link Pendataan	Penyampaian Link Pendataan Ke sekolah	Penyampaian prosentase hasil rekapan tiap sekolah by name by address
		8	Persentase Lulusan SMK yang terserap	Tracer Study SMK	Pembuatan Link Pendataan	Penyampaian Link Pendataan Ke sekolah	Penyampaian prosentase hasil rekapan tiap sekolah by name by address
3	Meningkatnya Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	9	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya	Pendataan, penataan OPK serta perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran seperti; Ketersediaan Dana Alokasi Khusus untuk menunjang pencapaian tujuan untuk *meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan*. Secara khusus sangat menunjang ketersediaan ruang kelas, dan sarana prasarana belajar bagi siswa sekolah. Demikian juga dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah yang sangat mendukung operasional sekolah. Disamping itu, komitmen kepala pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan program unggulan di bidang pendidikan sangat membantu pencapaian indikator kinerja seperti halnya dengan revitalisasi SMK. Dimana program ini secara utuh menjadi satu dengan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang SMK.

Secara umum penyebab kegagalan pencapaian kinerja karena keterbatasan anggaran selain itu sering terkendala karena kurangnya management terhadap data. Oleh karena itu updating data yang ada di Dapodik tiap sekolah harus diberdayakan secara maksimal oleh pihak sekolah dan seharusnya, pengelolaan data bidang pendidikan menjadi isu penting sehingga pencapaian kinerja dapat terukur secara empirik yang bukan berdasarkan kepada laporan realisasi fisik dan keuangan saja. Selain itu, masih banyak kendala atau pengganggu seperti sering terjadi refocusing anggaran yang secara nyata dan langsung mengganggu ketercapaian indikator

3.6. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2023 sebesar Rp. 1.724.616.415.106,- Tersebar ke Sekretariat, 5 Bidang , 8 Kantor Cabang Dinas, dan 3 UPTD.

	Anggaran	Realisasi	Serapan
BTIDP	525.599.100,00	504.192.444,00	95,93 %
CD KOB	939.234.960,00	891.748.445,00	94,94 %
CD DOMPU	561.137.400,00	552.082.980,00	98,39 %
MALOMBA	754.364.300,00	736.817.060,00	97,67 %

CD LOTENG	868.347.400,00	819.256.104,00	94,35 %
CD LOTIM	861.838.525,00	751.771.214,00	87,23 %
CD LOTARA	599.385.800,00	554.388.011,00	92,49 %
CD SUMBAWA	797.550.780,00	758.655.180,00	95,12 %
CD KSB	512.545.400,00	510.066.253,00	99,52 %
SEKRETARIAT	1.054.358.569.943,00	961.878.693.652,00	91,23 %
BIDANG SMA	302.359.484.731,00	289.766.002.539,00	95,83 %
BIDANG SMK	243.968.561.725,00	234.899.402.256,00	96,28 %
BIDANG PK	35.869.413.282,00	34.507.756.958,00	96,20 %
GTK	51.146.014.300,00	50.781.138.115,00	99,29 %
KEBUDAYAAN	1.851.037.800,00	1.697.666.315,00	91,71 %
TAMBUD	3.400.253.500,00	3.150.536.955,00	92,66 %
MUSEUM	3.224.564.660,00	3.125.974.752,00	96,94 %
BLUD SMK	22.018.511.500	12.313.774.305	55,92 %
JUMLAH	1.724.616.415.106,00	1.598.199.923.537,80	92,67 %

TABEL 8. *DISTRIBUSI ANGGARAN APBD DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2023*

Dari jumlah Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2023 diatas, Sekretariat 61,14 %, Bidang SMA sebesar 17,53 %, Bidang SMK sebesar 14,15 %, Bidang PK sebesar 2,08 %, Bidang Ketenagaan sebesar 2,97 % dan Bidang Kebudayaan sebesar 0,11 %, KCD Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebesar 0,04 % , KCD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,04 % , KCD Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,05%, KCD Kabupaten Lombok Utara sebesar 0,03%, KCD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 0,03%, KCD Kabupaten Sumbawa 0,05% , KCD Kabupaten Dompu 0,03%, KCD Kota Bima dan Kabupaten Bima sebesar 0,05%, BTIDP sebesar 0,03%, UPTD Taman Budaya sebesar 0,20% dan Museum sebesar 0,19% dan BLUD SMK mengelola sebesar 1,28 %.

Total PAGU belanja pada APBD yang dikelola langsung oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2023, sebesar Rp. 1.724.616.415.106,- Realisasi pengeluaran sampai bulan Desember 2023 berjumlah Rp. 1.598.199.923.537,80 sehingga daya serapan anggaran adalah 92,67 % dan daya seraf Fisik 99,71 %.

3.7. Realisasi Anggaran Dinas Dikbud tahun 2023 per bidang dan UPTD

Tahun 2023 Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.364.544.935.756,- realisasi keuangan Rp.360.113.676.634; (98,78 %) dan daya serap Fisik 99.72 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 1,22 % sebesar Rp. 4.431.259.122; melalui 8 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16.

TABEL 9. REALISASI ANGGARAN DIKBUD NTB PER BIDANG DAN PER SUBBAGIAN

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			
		KEUANGAN		FISIK	Realis asi
		(Rp)	%		
02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.910.000	85.050.000	94,59	1	1
1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	84.985.000	84.985.000	100,00	1	1
1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.195.000	67.195.000	100,00	1	1
1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	65.845.000	65.330.000	99,22	1	1
1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	54.060.000	54.060.000	100,00	1	1
1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.080.000	58.230.000	96,92	1	1
1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.655.000	82.655.000	100,00	1	1
1.01.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.047.603.291.703	955.436.954.768	91,20	1	1
1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	411.538.600	410.578.600	99,77	1	1
1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.850.600	61.370.600	99,22	1	1
1.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.398.500	29.398.500	100,00	1	1

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realisasi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	37.068.800	37.068.800	100,00		
1.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	70.091.800	69.232.400	98,77		
1.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.378.800	53.378.800	100,00		
1.01.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.598.800	19.598.800	100,00		
1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.220.900	75.220.900	100,00		
1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	201.486.100	201.097.000	99,81		
1.01.01.1. 04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
1.01.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	32.174.500	31.974.500	99,38		
1.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.402.600	20.397.600	99,98		
1.01.01.1. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.815.300	68.392.050	99,38		
1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.737.500	20.687.500	99,76		
1.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.051.200	82.552.885	99,40		
1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.495.000	41.580.000	41,38		
1.01.01.1. .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.685.000	20.685.000	100,00		
1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.504.000	42.542.100	91,48		
1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.783.000	52.583.000	99,62		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realisasi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.919.000	29.657.500	90,09		
1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	34.650.000	26.530.000	76,57		
1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	30.900.000	30.900.000	100,00		
1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	79.800.000	78.477.113	98,34		
1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	785.592.500	763.965.365	97,25		
1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	159.332.400	159.157.400	99,89		
1.01.01.1. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.350.000	79.742.900	91,29		
1.01.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.974.000	14.974.000	78,92		
1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.300.000	509.438.385	86,60		
1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.244.791.040	2.132.534.360	95,00		
1.01.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	368.600.000	368.506.026	99,97		
1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.933.300	112.753.300	98,96		
1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	24.919.500	99,68		
1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.125.000	274.339.000	99,71		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	16.723.975.300	15.363.922.462	91,87	49	46
1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.073.883.000	3.246.388.702	79,69	12	9
1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	3.031.178.000	2.938.907.890	96,96	3	3
1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	4.986.065.750	4.644.477.545	93,15	6	6
1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	7.746.556.864	6.946.028.097	89,67	11	10
1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2.026.199.000	1.819.221.508	89,78	7	7
1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.296.405.000	4.251.550.637	80,27	18	17
1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	570.804.000	447.692.800	78,43	1	1
1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	996.873.000	930.560.050	93,35		
1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.822.059.500	10.818.029.358	84,37	50	49
1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	422.919.000	384.354.590	90,88	1	1
1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	29.702.845.500	27.031.173.598	91,01	129	128
1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.910.164.000	1.974.296.010	67,84	14	12
1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	2.312.468.944	2.065.471.255	89,32	5	5
1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1.634.972.000	1.179.729.910	72,16	5	5
1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1.172.706.942	1.076.289.300	91,78	1	1
1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	614.910.000	475.110.638	77,27	3	3
1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	686.951.000	543.149.296	79,07	4	4

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realisasi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	894.351.000	805.181.420	90,03	2	2
1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.645.206.000	1.534.779.754	93,29	6	6
1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	832.807.000	832.807.000	100,00	1	1
1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.114.655.000	3.587.693.136	87,19	17	17
1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	4.857.450.000	4.852.750.375	99,90	95	95
1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.641.493.100	1.595.592.800	97,20	5000	5000
1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	7.202.543.000	7.145.651.500	99,21	77	77
1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	502.668.300	502.034.100	99,87	6	6
1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	76.371.000	73.219.183	95,87	1200	1833
1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	31.403.000	24.533.000	78,12	100	150
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	180.593.793.131	180.593.793.131	100,00	344	344
1.01.02.1.01.57 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500.838.500	499.673.500	99,77	100	100
1.01.02.1.01.60 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.256.367.900	1.189.580.733	94,68	1	1
1.01.02.1.01.62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	477.601.000	392.359.261	82,15	100	428
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12.685.746.920	11.682.848.260	92,09	29	29
1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	36.614.133.650	30.447.235.124	83,16	25	25

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	3.394.718.000	2.969.425.763	87,47	10	10
1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	927.237.000	729.819.290	78,71	3	3
1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.961.722.000	3.350.148.682	84,56	26	261
1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12.685.746.920	11.682.848.260	92,09		
1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.337.369.700	3.279.223.966	98,26	15	15
1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	7.850.000.000	7.835.203.330	99,81	52	52
1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.600.000.000	1.590.967.500	99,44	10000	10000
1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	37.813.697.000	37.476.528.438	99,11	80	80
1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	541.092.346	537.660.800	99,37	7	7
1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	399.499.900	372.804.804	93,32	200	200
1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	116.437.000	62.086.934	53,32	4879	8067
1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	38.275.000	27.515.000	71,89	120	51
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.105.253.400	1.083.093.400	98,00	100	100
1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	132.702.880.409	132.702.880.409	100,00	329	329
1.01.02.1.02.53 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	350.000.000	324.712.156	92,77	1	1
1.01.02.1.02.55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	530.499.400	427.248.400	80,54	100	63
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus					
1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	8.791.819.950	8.232.215.000	93,63	1	1

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			Realisasi
		KEUANGAN		FISIK	
		(Rp)	%		
1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	827.627.400	826.174.800	99,82	2	2
1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	258.889.600	250.268.908	96,67	1	1
1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	331.501.400	279.668.554	84,36	1	1
1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	189.869.100	188.349.700	99,20	1	1
1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	1.249.807.900	1.171.436.680	93,73	1	1
1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium	463.439.250	394.363.266	85,09	1	1
1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	511.965.400	489.883.936	95,69	1	1
1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	26.000.000	25.570.000	98,35	2	2
1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	167.612.250	99.635.290	59,44	1	1
1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	316.595.600	288.236.342	91,04	1	1
1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	1.279.398.250	1.086.678.520	84,94	10	10
1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	968.689.500	954.183.500	98,50	2897	2897
1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	522.199.100	488.967.560	93,64	2	2
1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.923.013.000	1.887.737.500	98,17	122	122
1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	79.228.000	42.853.000	54,09	791	791
1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	105.177.000	88.807.000	84,44	100	8
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.337.528.582	16.337.528.582	100,00	50	50
1.01.02.1.03.56 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	337.904.000	327.584.000	96,95	100	115
1.01.02.1.03.59 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	166.500.000	160.745.000	96,54		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.02.1.03.60 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	707.725.000	667.653.400	94,34	1	1
1.01.02.1.03.61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	306.923.000	219.216.420	71,42	80	80
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					
1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	50.973.633.500	50.683.713.115	99,43	24	24
1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	172.380.800	97.425.000	56,52	12	12
02.00 SMKN 1 Dompu					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.689.077.000	939.296.500,00	55,61		
02.00 SMKN 1 Donggo					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	792.250.000	88.497.000,00	11,17		
02.00 SMKN 1 Lingsar					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.025.000.000	785391000	25,96		
02.00 SMKN 1 Praya					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.598.750.000	1966304788	75,66		
02.00 SMKN 1 Selong					

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.528.065.000	2120950000	60,12		
02.00 SMKN 1 Taliwang					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.225.970.000	702595000	57,31		
02.00 SMKN 2 Kota Bima					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	638.400.000	262928000	41,19		
02.00 SMKN 2 Kuripan					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.793.200.000	820990000	45,78		
02.00 SMKN 2 Sumbawa					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.570.000.000	1217334600	77,54		
02.00 SMKN 3 Mataram					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.547.102.000	2079210702	58,62		
02.00 SMKN 5 Mataram					
1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
1.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.610.697.500	1330276715	82,59		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
	2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.152.481.100	1.023.893.600	88,84		
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	159.718.300	153.356.700	96,02		
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					
2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	416.251.100	399.907.215	96,07		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					
2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	122.587.300	120.508.800	98,30		
02.00 Museum Negeri					
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.564.000	7.350.000	97,17		
2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.564.000	7.350.000	97,17		
2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.22.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.372.300	32.868.600	98,49		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realisasi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.983.700	17.983.700	100,00		
2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.250.000	5.250.000	100,00		
2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.040.000	4.700.000	93,25		
2.22.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.500.000	10.500.000	100,00		
2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.987.600	115.932.437	97,43		
2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.620.000	1.450.000	40,06		
2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.450.000	189.701.855	81,96		
2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	907.283.060	889.783.060	98,07		
2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000	43.620.000	100,00		
2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.330.000	32.330.000	100,00		
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi					
2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	514.190.000	497.022.000	96,66		
2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	34.016.500	31.211.000	91,75		
2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	869.782.500	857.188.600	98,55		
2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	324.802.000	324.533.500	99,92		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	57.209.000	57.200.000	99,98		
02.00 Taman Budaya					
2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	476.000	476.000	100,00		
2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	533.000	0	0,00		
2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.22.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.080.000	30.080.000	100,00		
2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.382.000	3.382.000	100,00		
2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
2.22.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	425.000	425.000	100,00		
2.22.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
2.22.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	2.545.000	2.545.000	100,00		
2.22.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.450.200	2.450.200	100,00		
2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.779.000	16.779.000	100,00		
2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.169.000	9.169.000	100,00		
2.22.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.610.000	5.610.000	100,00		
2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0			
2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.644.000	1.644.000	100,00		
2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.510.000	83,89		

NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi		FISIK	Realis asi
		KEUANGAN			
		(Rp)	%		
2.22.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material		0			
2.22.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu		0			
2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.000.000	53.796.460	99,62		
2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	372.300	372.300	100,00		
2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.494.000	190.025.435	81,04		
2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.800.000	785.300.000	99,68		
2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.620.000	25.620.000	100,00		
2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.074.000	23.074.000	100,00		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	526.045.000	525.805.000	99,95		
2.22.02.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	463.880.000	263.880.000	56,89		
2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.210.075.000	1.208.593.560	99,88		

3.8. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB tahun 2018 s.d 2023

Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tertuang dalam Tabel berikut di bawah ini. Dalam tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah anggaran yang tersedia di dalam DPA tahun tersebut dan jumlah prosentase realisasi keuangan dan realisasi fisik dalam anggaran pada tahun-tahun tersebut.

Tabel. 10 Jumlah dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023

No.	Tahun Anggaran	Anggaran	Perse ntase Realis asi Keuan gan	Realisasi Keuangan	Persentas e Realisasi Fisik	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7
1	2018	1,205,298,953,454.00	95.41 %	1,148,288,312,955.63	98.95 %	
2	2019	1,240,254,550,830.00	96.04 %	1,232,440,947,159.77	99.37 %	
3	2020	1,257,305,198,489.00	98.32 %	1,123,025,003,290.37	99.84 %	
4	2021	2,008,559,191,955.00	98.01 %	1,968,588,864,035.10	98.44%	
5	2022	1.615.948.287.284,00	89.34 %	1.443.642.916.580	99.71 %	
6	2023	1.724.616.415.106,-	92,67 %	1.598.199.923.537,80	99,81 %	
7	2024					

3.9. Efisiensi Anggaran Dinas Dikbud Prov. NTB tahun 2023

Tabel 11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya										
NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	TARGET kinerja	REALISASI kinerja	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Relevansi dengan kondisi kinerja	EFISIENSI	Ket
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,615,948,287,284.00	1,443,642,916,580.00	89.34	relevan	172,305,370,704.00	
SEKRET	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100%	89.910.000	85.050.000	94,59	relevan	4.860.000	
SEKRET	1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	84.985.000	84.985.000	100,00	relevan	-	
SEKRET	1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	67.195.000	67.195.000	100,00	relevan	-	
SEKRET	1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	4	100%	65.845.000	65.330.000	99,22	relevan	515.000	
SEKRET	1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	54.060.000	54.060.000	100,00	relevan	-	
SEKRET	1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	60.080.000	58.230.000	96,92	relevan	1.850.000	

SEKRET	1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100%	82.655.000	82.655.000	100,00	relevan	-	
SEKRET	1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7288	7288	100%	1.047.603.291.703	955.436.954.768	91,20		92.166.336.935	
SEKRET	1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270	270	100%	411.538.600	410.578.600	99,77		960.000	
SEKRET	1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1650	1650	100%	61.850.600	61.370.600	99,22		480.000	
SEKRET	1.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	29.398.500	29.398.500	100,00			
SEKRET	1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25	25	100%	37.068.800	37.068.800	100,00			
SEKRET	1.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	100%	70.091.800	69.232.400	98,77		859.400	
SEKRET	1.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	53.378.800	53.378.800	100,00			
SEKRET	1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	19.598.800	19.598.800	100,00			

SEKRET	1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	544	544	100%	75.220.900	75.220.900	100,00			
SEKRET	1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	201.486.100	201.097.000	99,81		389.100	
SEKRET	1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	480	480	100%	32.174.500	31.974.500	99,38		200.000	
SEKRET	1.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	100%	20.402.600	20.397.600	99,98		5.000	
SEKRET	1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	50	100%	68.815.300	68.392.050	99,38		423.250	
SEKRET	1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1045	1045	100%	20.737.500	20.687.500	99,76		50.000	
SEKRET	1.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100%	83.051.200	82.552.885	99,40		498.315	
SEKRET	1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	100%	100.495.000	41.580.000	41,38		58.915.000	
SEKRET	1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	9	100%	20.685.000	20.685.000	100,00			

SEKRET	1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7	7	100%	46.504.000	42.542.100	91,48		3.961.900	
SEKRET	1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17	17	100%	52.783.000	52.583.000	99,62		200.000	
SEKRET	1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	4	100%	32.919.000	29.657.500	90,09		3.261.500	
SEKRET	1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720	720	100%	34.650.000	26.530.000	76,57		8.120.000	
SEKRET	1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	4	4	100%	30.900.000	30.900.000	100,00		-	
SEKRET	1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	2	2	100%	79.800.000	78.477.113	98,34		1.322.887	
SEKRET	1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100%	785.592.500	763.965.365	97,25		21.627.135	
SEKRET	1.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
SEKRET	1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250	250	100%	159.332.400	159.157.400	99,89		175.000	
SEKRET	1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	7	100%	87.350.000	79.742.900	91,29		7.607.100	

SEKRET	1.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	3	3	100%						
SEKRET	1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240	240	100%	18.974.000	14.974.000	78,92		4.000.000	
SEKRET	1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	100%	588.300.000	509.438.385	86,60		78.861.615	
SEKRET	1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100%						
SEKRET	1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156	156	100%	2.244.791.040	2.132.534.360	95,00		112.256.680	
SEKRET	1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
SEKRET	1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	35	100%	368.600.000	368.506.026	99,97		93.974	
SEKRET	1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120	120	100%	113.933.300	112.753.300	98,96		1.180.000	
	1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000	24.919.500	99,68		80.500	

SEKRET	1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				275.125.000	274.339.000	99,71		786.000	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
SMA	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
SMA	1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	69	23	33%	16.723.975.300	15.363.922.462	91,87		1.360.052.838	
SMA	1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	0	0%	4.073.883.000	3.246.388.702	79,69		827.494.298	
SMA	1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	17	0	0%	3.031.178.000	2.938.907.890	96,96		92.270.110	
SMA	1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	26	0	0%	4.986.065.750	4.644.477.545	93,15		341.588.205	
SMA	1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	29	0	0%	7.746.556.864	6.946.028.097	89,67		800.528.767	
SMA	1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	4	0	0%	2.026.199.000	1.819.221.508	89,78		206.977.492	
SMA	1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	0	0%	5.296.405.000	4.251.550.637	80,27		1.044.854.363	
SMA	1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6	0	0%	570.804.000	447.692.800	78,43		123.111.200	
SMA	1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	1	0	0%	996.873.000	930.560.050	93,35		66.312.950	

SMA	1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	34	4	12%	12.822.059.500	10.818.029.358	84,37		2.004.030.142	
SMA	1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1	0	0%	422.919.000	384.354.590	90,88		38.564.410	
SMA	1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	115	2	2%	29.702.845.500	27.031.173.598	91,01		2.671.671.902	
SMA	1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	13	0	0%	2.910.164.000	1.974.296.010	67,84		935.867.990	
SMA	1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	11	0	0%	2.312.468.944	2.065.471.255	89,32		246.997.689	
SMA	1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	4	0	0%	1.634.972.000	1.179.729.910	72,16		455.242.090	
SMA	1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	4	0	0%	1.172.706.942	1.076.289.300	91,78		96.417.642	
SMA	1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	3	0	0%	614.910.000	475.110.638	77,27		139.799.362	
SMA	1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	1	0	0%	686.951.000	543.149.296	79,07		143.801.704	
SMA	1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	0	0%	894.351.000	805.181.420	90,03		89.169.580	
SMA	1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	8	0	0%	1.645.206.000	1.534.779.754	93,29		110.426.246	

SMA	1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	3	0	0%	832.807.000	832.807.000	100,00			
SMA	1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	53	0	0%	4.114.655.000	3.587.693.136	87,19		526.961.864	
SMA	1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	113	113	100%	4.857.450.000	4.852.750.375	99,90		4.699.625	
SMA	1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	1	100%	1.641.493.100	1.595.592.800	97,20		45.900.300	
SMA	1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				7.202.543.000	7.145.651.500	99,21		56.891.500	
SMA	1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	48	48	100%	502.668.300	502.034.100	99,87		634.200	
SMA	1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	105	105	100%	76.371.000	73.219.183	95,87		3.151.817	
	1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				31.403.000	24.533.000	78,12		6.870.000	
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				180.593.793.131	180.593.793.131	100,00			

	1.01.02.1.01.57 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				500.838.500	499.673.500	99,77		1.165.000	
	1.01.02.1.01.60 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1.256.367.900	1.189.580.733	94,68		66.787.167	
	1.01.02.1.01.62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				477.601.000	392.359.261	82,15		85.241.739	
SMK	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
SMK	1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	96	93.61	98%	12.685.746.920	11.682.848.260	92,09		1.002.898.660	
SMK	1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24	22.9	95%	36.614.133.650	30.447.235.124	83,16		6.166.898.526	
	1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium				3.394.718.000	2.969.425.763	87,47		425.292.237	
	1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah				927.237.000	729.819.290	78,71		197.417.710	
SMK	1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	36	35.6	99%	3.337.369.700	3.279.223.966	98,26		58.145.734	

SMK	1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	156	156	100%	7.850.000.000	7.835.203.330	99,81		14.796.670	
	1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				1.600.000.000	1.590.967.500	99,44		9.032.500	
	1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				37.813.697.000	37.476.528.438	99,11		337.168.562	
	1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				541.092.346	537.660.800	99,37		3.431.546	
	1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				399.499.900	372.804.804	93,32		26.695.096	
	1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				116.437.000	62.086.934	53,32		54.350.066	
	1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				38.275.000	27.515.000	71,89		10.760.000	
SMK	1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				1.105.253.400	1.083.093.400	98,00		22.160.000	
SMK	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				132.702.880.409	132.702.880.409	100,00			

	1.01.02.1.02.53 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				350.000.000	324.712.156	92,77		25.287.844	
	1.01.02.1.02.55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				530.499.400	427.248.400	80,54		103.251.000	
PK	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus									
	1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				8.791.819.950	8.232.215.000	93,63		559.604.950	
PK	1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12	0	0%	827.627.400	826.174.800	99,82		1.452.600	
	1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				258.889.600	250.268.908	96,67		8.620.692	
	1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				331.501.400	279.668.554	84,36		51.832.846	
PK	1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	0	0%	189.869.100	188.349.700	99,20		1.519.400	
PK	1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	8	0	0%	1.249.807.900	1.171.436.680	93,73		78.371.220	
	1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium				463.439.250	394.363.266	85,09		69.075.984	
PK	1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1	0	0%	511.965.400	489.883.936	95,69		22.081.464	

	1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				26.000.000	25.570.000	98,35		430.000	
	1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				167.612.250	99.635.290	59,44		67.976.960	
PK	1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	0	0%	316.595.600	288.236.342	91,04		28.359.258	
PK	1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	22	22	100%	1.279.398.250	1.086.678.520	84,94		192.719.730	
	1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				968.689.500	954.183.500	98,50		14.506.000	
PK	1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50	50	100%	522.199.100	488.967.560	93,64		33.231.540	
	1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				1.923.013.000	1.887.737.500	98,17		35.275.500	
	1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				79.228.000	42.853.000	54,09		36.375.000	
	1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				105.177.000	88.807.000	84,44		16.370.000	

PK	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3,609	3,609	100%	16.337.528.582	16.337.528.582	100,00			
	1.01.02.1.03.56 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				337.904.000	327.584.000	96,95		10.320.000	
	1.01.02.1.03.59 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				166.500.000	160.745.000	96,54		5.755.000	
	1.01.02.1.03.60 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				707.725.000	667.653.400	94,34		40.071.600	
PK	1.01.02.1.03.61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	4	4	100%	306.923.000	219.216.420	71,42		87.706.580	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									
SMA	1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
SMK	1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
GTK	1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7	7	100%	50.973.633.500	50.683.713.115	99,43		289.920.385	
GTK	1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	3	100%	172.380.800	97.425.000	56,52		74.955.800	
GTK	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN									

GTK	1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5	5							
GTK	1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5	5							
BTIDP	02.0001 Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan									
BTIDP	1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	6							
BTIDP	1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
BTIDP	1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57	57							
BTIDP	1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2							
BTIDP	1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material									
BTIDP	1.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1							
BTIDP	1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	16							
BTIDP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
BTIDP	1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8	8							
BTIDP	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
BTIDP	1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8	8							

KEBUD	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
KEBUD	2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12	10							
KEBUD	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
KEBUD	2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
KEBUD	2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100	180							
KEBUD	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
KEBUD	2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi									
KEBUD	2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	450	482							
KEBUD	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
KEBUD	2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi									
KEBUD	2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	10	10							
TAMBUD	02.0002 Taman Budaya									
TAMBUD	2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
TAMBUD	2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	2							

TAMBUD	2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3							
TAMBUD	2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312	312							
TAMBUD	2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
TAMBUD	2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	3							
TAMBUD	2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49	47							
TAMBUD	2.22.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	4							
TAMBUD	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
TAMBUD	2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
TAMBUD	2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	4	4							
TAMBUD	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									
TAMBUD	2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20	20							
MUSEUM	02.0003 Museum Negeri									

MUSEUM	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
MUSEUM	2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
MUSEUM	2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
MUSEUM	2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.564.000	7.350.000	97,17		214.000	
	2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.564.000	7.350.000	97,17		214.000	
MUSEUM	2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
MUSEUM	2.22.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material									
MUSEUM	2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
MUSEUM	2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
MUSEUM	2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
MUSEUM	2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
MUSEUM	2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
MUSEUM	2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

MUSEUM	2.22.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel									
MUSEUM	2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
MUSEUM	2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288	288							
MUSEUM	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									
MUSEUM	2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi									
MUSEUM	2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2000	3000							
MUSEUM	2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	15	17							
MUSEUM	2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	37	41							
MUSEUM	2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1	1							
MUSEUM	2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	20	20							

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan atas Capaian Kinerja

Tahun 2023, adalah tahun masa transisi dari masa Pandemi Covid 19 dengan memasuki masa endemi Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia memberi slogan **Pulih lebih cepat Bangkit lebih Kuat** tantangan dan ujian yang dihadapi Rakyat Indonesia khususnya Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangatlah berat selain harus berjuang dengan dana yang besar untuk mengatasi Pandemi Covid 19 juga bertahan untuk memulihkan perekonomian rakyat yang sudah menurun drastis. Dengan slogan tersebut memberikan semangat untuk bangkit mampu bertahan dan lebih kuat lagi di tahun 2023 ini.

Pada tahun 2023 ini angka capaian kinerja masih menunjukkan peningkatan bisa dilihat pada keterangan di atas. Pada tahun ini baru pertama kali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Tracer Study atau penelusuran Alumni SMA yang melanjutkan dan Alumni SMK terserap dengan kriteria lulus bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Presentase SMA masih belum mencapai target maksimal yakni 100 % dari yang tahun sebelumnya 65 % menjadi 66 % sedangkan untuk SMK telah melampaui target yakni 35 % menjadi 35,31 % sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilanjutkan lagi Program Tracer Study ini dengan perbaikan dan sosialisasi kepada semua Sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat berbagai permasalahan dan kendala namun secara singkat dapat dinyatakan bahwa penyebab utama adalah keterbatasan anggaran sehingga perlu langkah – langkah efektif dan efisiensi bahkan penentuan prioritas yang tentunya mengakibatkan pencapaian indikator kinerja terganggu. Namun Dikbud NTB setiap tahunnya didukung oleh Dana Alokasi Khusus fisik terutama untuk revitalisasi sekolah menengah serta Dana Alokasi Khusus non fisik untuk bantuan biaya operasional sekolah, pengelolaan Museum, dan Taman Budaya.

2. Langkah ke depan dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendataan adalah hal yang paling berperan penting dalam menentukan rumusan suatu capaian kinerja dalam suatu OPD dan kerjasama yang baik serta koordinasi dari berbagai pihak yang saling berhubungan.

Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan diperlukan pendataan yang baik melalui Operator Sekolah lewat Dapodikdasmen, Emis oleh Kementerian Agama serta Dapodikdasmen tiap Kabupaten/kota. Untuk itu diperlukannya langkah-langkah yang tepat diantaranya adalah :

- 4. Telah dilakukannya MOU dengan Pihak dari Pusdatin
- 5. Koordinasi yang baik dengan pihak Kementerian Agama Provinsi NTB
- 6. Koordinasi dengan Dukcapil Provinsi NTB
- 7. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Besar harapan dengan adanya MOU serta koordinasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang baik sehingga capaian kinerja tahun-tahun mendatang dapat meningkat yang berimplikasi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Amin